

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainuddin 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dellyana, Shanty, 2004, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Djamil, Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,
- Faisal, Sanapiah, 2005, *Format-Format Penelitian Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy OS 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartono, Kartini, 1986, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Muhammad, Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik, dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung.
- Nawawi, Hadari 2005, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Maada University Press, Yogyakarta.



Prakoso, Abintoro, 2013, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.

Sambas, Nandang, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soetodjo, Wagianti, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta.

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Usman, Husain dan Purnomo Setiady Akbar, 2006, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 1991, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disertai Penjelasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32. Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3143).



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disertai Penjelasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disertai Penjelasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai Penjelasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disertai Penjelasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan disertai Penjelasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disertai Penjelasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disertai Penjelasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5332).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disertai penjelasannya (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5606).

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Latihan Terpadu bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.



Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.

### **C. PENETAPAN DAN PUTUSAN PENGADILAN**

Penetapan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 22/Pen.Diversi/2017/PN.Smn.

Penetapan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 2/Pen.Diversi/2018/PN.Smn.

Penetapan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 11/Pen.Diversi/2018/PN.Smn.

Penetapan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 34/Pen.Div/2018/PN.Smn.

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Smn.

### **D. PENULISAN HUKUM**

Bagus Indika, 2016, "Penerapan Keadilan Restoratif Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum Terkait Tindak Pidana Narkotika pada Tahap Penyidikan dalam Peradilan Pidana Indonesia", *Penulisan Hukum*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Marhaeni Linda Hapsari, 2019, "Pengenaaan Delik pada Perbuatan Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus: Klitih di Yogayakarta)", *Penulisan Hukum*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Phisca Purbayani, Fani, 2012, "Peran Aparat Penegak Hukum dalam Penerapan Konsep Restorative Justice Pada Perkara Pidana Anak di Kabupaten



Purbalingga dan Kota Yogyakarta”, *Penulisan Hukum*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

### E. Majalah

Alfi Arifin, Kamil, “Jogja Masih Darurat Klithih” *Majalah Paranala*, Maret-April 2017.

Syafi’ie, M., “Klithih: Krisis Lingkungan Sosial” *Majalah Paranala*, Maret-April 2017.

### F. Jurnal

Andi Meyrina, Susana, “*Restorative Justice* Berdasarkan Peradilan Anak dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17, No. 1, Maret 2017.

### G. Internet

Databoks, “Jumlah Penduduk Indonesia 269 Juta Jiwa, Terbesar Keempat di Dunia”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/29/jumlah-penduduk-indonesia-269-juta-jiwa-terbesar-keempat-dunia>, diakses pada tanggal 11 September 2019.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Pidana Khusus”, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-sleman/direktori/pidana-khusus/index-7.html>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2019.

Kaskus, “Dalam Semalam Dua Aksi Klithih Terjadi di Sleman”, <https://www.kaskus.co.id/thread/58fada02642eb6dd2d8b4574/dalam-semalam-dua-aksi-klithih-terjadi-di-sleman/>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2019.

Kusnanto, Karasan, “Klithih, Apa Sih Arti Sebenarnya”, <https://kusnantokarasan.com/tag/pengertian-klithih>, diakses pada tanggal 4 September 2019.

Serba Tahu, “Arti Kata Klithih”, <https://www.serbatahu.com/arti/gaul/klithih>, diakses pada tanggal 4 September 2019.



Badan Pusat Statistik, “Piramida Penduduk Indonesia”, <https://sp2010.bps.go.id/>, diakses pada tanggal 11 September 2019.